

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan yang semakin ketat dalam sektor perbankan menuntut optimalisasi peranan perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan pun perlu dicermati kembali sejalan dengan perkembangan ekonomi sektor riil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ryan Kiryanto (2009 : 1):

Polemik soal lambannya fungsi intermediasi perbankan terus bergulir. Telah banyak wacana mengemuka untuk mencari solusi jitu atas macetnya sektor riil karena perbankan dituding tidak merespon perbaikan kondisi makro ekonomi dan relaksasi kebijakan yang telah dilakukan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, BAPPENAS pada bulan Agustus tahun 2005 mengemukakan dalam situs resminya www.bappenas.go.id bahwa “perkembangan perbankan saat ini ditandai oleh dua karakteristik pokok yaitu membaiknya kesehatan perbankan, namun fungsi intermediasinya belum pulih.”

Dua pernyataan di atas merupakan suatu kesimpulan dari keadaan perekonomian yang menunjukkan bahwa fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dana mengalami hambatan. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan terutama dalam hal penyaluran kredit bagi sektor usaha dan lebih jauh lagi akan berdampak pada pembangunan perekonomian negara.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan merupakan jantung perekonomian. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat yang menitipkan dana di bank serta menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini kredit merupakan indikator dari fungsi intermediasi bank karena kredit berhubungan langsung dengan sektor riil sebagai pemberi pasokan dana bagi sektor usaha yang mengajukan dana. Kredit yang diberikan pun merupakan suatu komponen aktiva terbesar yang pada akhirnya akan menjadi andalan pendapatan bank. Dikemukakan oleh Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2000: 155) “dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit atau debitor merupakan komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki suatu bank.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kredit yang diberikan bank berperan penting bagi bank itu sendiri karena kredit merupakan pendapatan terbesar bank yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah aktiva bank. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa tujuan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tahun 2005 merupakan tahun yang patut mendapat perhatian khusus, seperti yang tercantum dalam Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) no.6 Desember 2005 yang berbunyi “pada paruh kedua tahun 2005, perkembangan finansial

Indonesia diwarnai oleh berbagai tantangan yang berat akibat meningkatnya tekanan risiko yang berawal dari gejolak perekonomian internasional.”

Gejolak makro ekonomi tersebut mempengaruhi kondisi sektor riil baik korporasi maupun rumah tangga yang selanjutnya mempengaruhi kinerja sistem keuangan. Sementara itu kinerja investasi terus mengalami perlambatan. Dapat disadari bahwa investasi yang tumbuh cukup baik pada periode sebelumnya, pada periode ini mengalami penurunan sehingga memerlukan perhatian khusus guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, tahun 2006 pun merupakan tahun yang menjadi perhatian karena dampak dari gejolak perekonomian tahun 2005 masih terasa. Pada tahun 2006 ini dapat dikatakan bahwa roda usaha melambat karena kalangan pelaku dunia usaha mengatakan bahwa mereka kekurangan dana dalam menopang ekspansi usahanya:

Berdasarkan data BI, posisi kredit per April mencapai Rp. 855,4 triliun – meningkat dibandingkan Maret Rp. 843 triliun, Februari Rp. 826,3 triliun, dan Januari Rp. 817,5 triliun. Sementara dana pihak ketiga per April sebesar Rp. 1.299 triliun, naik dibandingkan Maret Rp. 1.291 triliun, Februari Rp. 1.291 triliun, dan Januari Rp. 1.279 triliun. Uniknyanya kalangan pelaku dunia usaha mengeluh bahwa mereka kekurangan dana guna menopang ekspansi usahanya. Akibatnya, gerak roda usaha menjadi lambat yang pada akhirnya tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Harus diakui, salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi adalah pergerakan dunia usaha yang lamban. Dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar 5,8%, faktanya hanya 5,5% yang tercapai. (Ryan Kiryanto, 2009 : 1)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006 gerak perekonomian melambat karena kekurangan dana. Mengacu pada fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, pada tahun tersebut dapat dikatakan bahwa bank kurang maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasinya sebagai penyalur kredit.

Bank Mandiri merupakan bank umum yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana berupa kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dana. Menurut pernyataan *Marketing Research Indonesia* pada *Detik Finance* tanggal 2 April 2008, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri menduduki peringkat nomor satu dalam hal pelayanan kepada nasabahnya. Hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bank Mandiri sebagai bank umum milik pemerintah. Selain itu, kontribusi Bank Mandiri dalam hal penyaluran kredit untuk usaha mikro cukup signifikan, seperti yang ditulis oleh *Pers Majalah Pengusaha* (2010 : 1):

Kiprah Bank Mandiri dalam pembiayaan usaha mikro menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Sejak diluncurkannya layanan kredit usaha mikro pada awal tahun 2005 s/d akhir tahun 2008, penyaluran kredit usaha mikro Bank Mandiri terus tumbuh dengan rata-rata kumulatif tiap tahunnya mencapai 48% hingga pada akhir tahun 2008 telah mencapai Rp. 4,4 triliun atau meningkat sebesar 63% dari posisi akhir tahun 2007 sebesar Rp. 2,7 triliun.

Sesuai dengan fenomena finansial makro yang telah dikemukakan sebelumnya, pada Bank Mandiri pun terjadi permasalahan finansial yakni permasalahan dalam hal pertumbuhan kredit. Penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk. meningkat dari tahun ke tahun namun perubahan atau pertumbuhannya mengalami ketidakkonsistenan yang menyebabkan kurang terprediksinya pemasukan atau pendapatan terbesar bank, yaitu pendapatan dari balas jasa pemberian kredit.

Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan penyaluran kredit PT. Bank Mandiri, Tbk:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penyaluran Kredit

Tahun	Kredit yang Disalurkan (dalam jutaan rupiah)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2002	Rp. 63.905.315,00	-
2003	Rp. 73.442.941,00	14,9%
2004	Rp. 88.544.609,00	20,6%
2005	Rp. 100.325.751,00	13,3%
2006	Rp. 109.379.723,00	9,0%
2007	Rp. 126.826.445,00	16,0%
2008	Rp. 159.007.051,00	25,4%

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BI, tahun 2009

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kredit yang diberikan PT. Bank Mandiri, Tbk. mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun bila dilihat dari pertumbuhannya memiliki persentase jumlah kenaikan penyaluran kredit yang tidak konsisten, seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan terutama pada tahun 2006 dimana persentase pertumbuhan jumlah penyaluran kredit mengalami titik terendah yaitu 9,0%. Diduga hal tersebut dipengaruhi oleh suku bunga BI yang masih relatif tinggi, uphoria pemberantasan KKN di bank BUMN, dan adanya imbauan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, perkebunan energi, seperti yang diungkapkan Djoko Retnadi (*Senior Economist The Indonesia Economic Intelligence*) dalam www.iei.or.id :

Ada tiga faktor eksternal bank yang diperkirakan akan mempengaruhi pola penyaluran kredit bank di semester II tahun 2006. Ketiga variabel tersebut adalah kondisi suku bunga (BI rate) yang masih relatif tinggi yang saat ini masih sebesar 12,75%, uphoria pemberantasan KKN di bank BUMN, dan adanya imbauan pemerintah kepada perbankan untuk membiayai proyek infrastruktur, perkebunan, dan energi. (Djoko Retnadi, 2010 : 1)

Setiap bank tentu menginginkan pendapatan yang tinggi untuk menjaga likuiditasnya yang kemudian berkontribusi terhadap kegiatan operasionalnya.

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa pendapatan bank tertinggi didapat dari pendapatan balas jasa yang berasal kredit yang diberikan. Selain itu, dana dari masyarakat yang menyalurkan kredit juga merupakan suatu komponen yang dapat meningkatkan penyaluran kredit bank.

Pengertian likuiditas menurut Kasmir (2008 : 286) adalah “rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.” Selain itu, Lukman Dendawijaya (2009 : 114) mengungkapkan bahwa “analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.”

Jadi, dalam memberikan suatu kredit, bank harus memperhatikan tingkat likuiditasnya karena tingkat likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas ini menunjukkan alat pembayaran yang dimiliki lebih besar dari utang jangka pendeknya.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat likuiditas adalah dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang merupakan rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan dengan dana yang diterima.

Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. (Kasmir, 2008 : 286)

Ada suatu pandangan bahwa pada tahun 2006 peran intermediasi bank tidak optimal, dilihat dari tingkat likuiditasnya serta dari pertumbuhan penyaluran kredit bank.

Dengan mengacu pada posisi rasio total dana pihak ketiga terhadap total kredit (loan to deposit ratio – LDR) yang rendah di tahun 2006, hanya 61%, memunculkan pandangan bahwa peran intermediasi perbankan berjalan tidak optimal. (Ryan Kiryanto, 2009 : 1)

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa rasio likuiditas (LDR) dapat menjadi ukuran kinerja bank dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, dana merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan operasional bank terutama dalam pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat.

Likuiditas ketat yang terjadi berlarut-larut sangat membahayakan industri perbankan karena bank tidak mudah lagi mendapatkan dana, baik untuk kredit, maupun memenuhi penarikan oleh nasabah. Kondisi ini bisa berakibat pada hilangnya kepercayaan nasabah kepada bank dan berujung pada minimnya jumlah kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi keadaan perekonomian secara makro akibat kurangnya permodalan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha dimana permodalannya dipengaruhi oleh kredit yang diberikan bank.

Bank memiliki beberapa sumber dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal pemberian kredit, salah satunya adalah dana dari pihak ketiga yang terdiri atas tabungan, giro dan deposito. Pentingnya dana bank ini diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2009 : 45) yaitu “tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali.”

Selain itu, dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang paling diutamakan. Dana pihak ketiga ini dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu bank jika dana pihak ketiga tersebut dapat memenuhi sumber dana operasional bank

termasuk dalam hal pelaksanaan fungsi intermediasi bank yaitu penyaluran kredit.

Kasmir (2008 : 47) mengungkapkan:

Dana yang berasal dari masyarakat luas.... Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Teori tersebut membuktikan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang sangat penting untuk kegiatan operasional bank, khususnya dalam kegiatan penyaluran kredit.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang jumlah dana pihak ketiga pada PT. Bank Mandiri Tbk.
2. Bagaimana deskripsi tentang tingkat likuiditas pada PT. Bank Mandiri Tbk.
3. Bagaimana deskripsi tentang penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk.
4. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas secara parsial dan bersama-sama terhadap penyaluran kredit PT. Bank Mandiri, Tbk.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang dana pihak ketiga pada PT. Bank Mandiri Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat likuiditas pada PT. Bank Mandiri Tbk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas secara parsial dan bersama-sama terhadap penyaluran kredit PT. Bank Mandiri, Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PT Bank Mandiri, Tbk. dalam hal pengelolaan sumber dana pihak ketiga dan pengelolaan likuiditas bank untuk mengoptimalkan kegiatan operasional utama bank yaitu menyalurkan kredit.

